



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN MELALUI
INDEKS KESEJAHTERAAN
KABUPATEN/KOTA
SUMATERA
UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

DEVIKA NADYA

NPM : 1515100388

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEVIKA NADYA
NPM : 1515100388
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN MELALUI INDEKS
KESEJAHTERAAN KABUPATEN/KOTA SUMATERA
UTARA

MEDAN, Agustus 2019

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN



(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

PERSETUJUAN UJIAN

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

NAMA : DEVIKA NADYA
NPM : 1515100388
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN MELALUI INDEKS
KESEJAHTERAAN KABUPATEN/KOTA SUMATERA
UTARA**

MEDAN, Agustus 2019

KEPUA



(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA-II

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

ANGGOTA-I

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

ANGGOTA-III

(Handriyani Dwilita SE., M.Si)

ANGGOTA-IV

(Irawan, SE.,M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVIKA NADYA
Tempat/Tanggal Lahir : BATAM, 20 JUNI 1995
NPM : 1515100388
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : AKUNTANSI
Alamat : JL. SETIA LUHUR DWIKORA MEDAN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Agustus 2019

Hormat Saya



(Devika Nadya)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devika Nadya
NPM : 1515100388
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : S 1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2019




(Devika Nadya)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

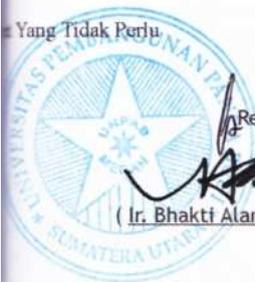
Nama Lengkap : DEVIKA NADYA
 Tempat/Tgl. Lahir : Batam / 20 Juni 1995
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100388
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 138 SKS, IPK 3.42
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 19 Februari 2019

Pemohon,

(Devika Nadya)

Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 14 Maret 2019

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 19 Februari 2019

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

Tanggal : 12 Maret 2019

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.SI)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

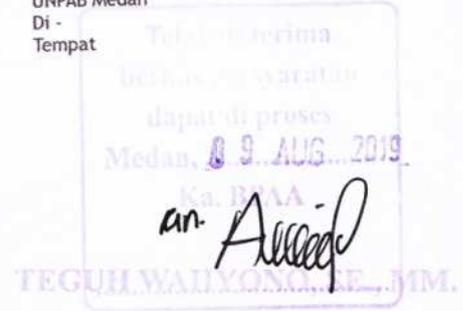
Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Agustus 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Bersama dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVIKA NADYA
Tempat/Tgl. Lahir : BATAM / 20 JUNI 1995
Nama Orang Tua : IRWAN SYAH
N. P. M : 1515100388
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082269850237
Alamat : JL. SETIA LUHUR GG. NUSA INDAH

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

M 9/8 19
Dik

Ukuran Toga :

M



Hormat saya

Devika Nadya
1515100388

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

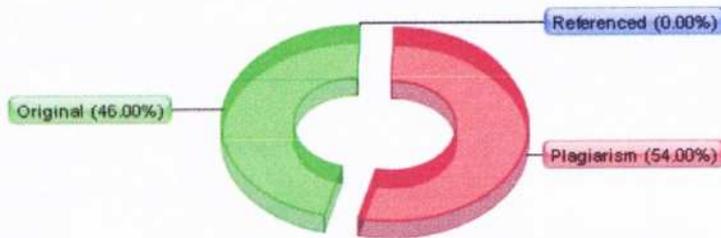
Analyzed document: 22/07/2019 16:02:28

DEVIKA NADYA_1515100388_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 66	wrds: 8251	https://id.123dok.com/document/1y966vwy-pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dan-dana-bagi-hasi...
% 60	wrds: 7452	https://id.123dok.com/document/wye4erz7-flypaper-effect-pada-unconditional-grant-dan-penda...
% 46	wrds: 5829	http://eprints.undip.ac.id/22587/1/SKRIPSI_-_NUR_INDAH_RAHMAWATI.PDF

Show other Sources:]

Processed resources details:

227 - Ok / 31 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Urls:



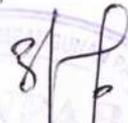
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : FITRIYANI PANGGABEAN, SE, M.Si
 Pembimbing II : YUNITA SARI RIORI, SE, M.Si
 Mahasiswa : DEVIKA NADYA
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1515100388
 Pendidikan : SEMESTER I
 Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGANE
 TERHADAP Tingkat kemandirian pengelolaan keuangan
 Kabupaten /kota Sumatera Utara.

NO	WAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09	/19	- Perbaiki Cover - Perbaiki Spasi - Daftar Pustaka - Tabel	YSR	
14	/19	- Perbaiki DAFTAR PUSTAKA - Perbaiki Spasi - Tabel	YSR	
14	/19	- Perbaiki DAFTAR PUSTAKA	YSR	
14	/19	ACC Seminar PROPOSAL	YSR	

Medan, 12 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,


 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Fikri Yuni Panggabean SE.MSI
 Pembimbing II : Yunita Sari Rioni SE.MSI
 Mahasiswa : DEVIKA NADYA
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1515100388
 Pendidikan : Strata I
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1/5	<ul style="list-style-type: none"> - BerB-iki abstrak - Teori disesuaikan dgn dektor pustaka - Spesi - Tabel peneliti terdahulu 	YSA	
7/19	ACC Sidang Meja Hijau	YSA	

Medan, 17 Juli 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Fitriyani Pengasaban SE.MSI
 Pembimbing II : Yurita Sari Rioni SE.MSI
 Mahasiswa : DEVIKA NADYA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100388
 Mata Kuliah Pendidikan : Statistik I
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Pendekatan Aritmetika dan Dana Perimbangan terhadap
 Tingkat Kemandirian Keuangan melalui Indeks Kesejahteraan
 Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

WAKTU	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10.6 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi masalah berdasarkan dan latar belakang - Rumusan masalah - kerangka konseptual - Tujuan penelitian - Restren yg dipakai - Metode penelitian - Jenis data - Daftar pustaka 		

Medan, 17 Juni 2019
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nisa S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Furri Yuni Panggabeh SE.MSI
 Pembimbing II : Yunita Sari Rioni SE.MSI.
 Mahasiswa : DEVIKA NADYA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100388
 Bidang Pendidikan : Strata I
 Tugas Akhir/Skripsi : Dengan Pendapat Asli dan Dana Perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan melalui indeks keberagaman Kabupaten/kota Sumatera Utara.

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
6/07 - 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang masalah - Identifikasi masalah - Metode penulisan - Pembahasan - Lampiran Data (tabel dan data) - Daftar pustaka. 		
	<p>Devika Nadya Skripsi  9/07 -2015</p>		

Medan, 17 Juni 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



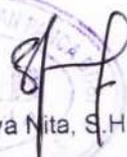
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yanti Panggabean SE.MSI
 Dosen Pembimbing II : Yunitz Sari Riani SE.MSI
 Nama Mahasiswa : DEVIKA NADYA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100388
 Bidang Pendidikan : STRATA I
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap
 Tingkat kemandirian Kabupaten melalui Indeks Kesejahteraan
 Kabupaten Kota Sumatera Utara.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
13/06 -2019	<ul style="list-style-type: none"> - latar belakang masalah - Identifikasi masalah - Rumusan masalah (Ciri) - Indikator penelitian selanjutnya - Metode penelitian - Kegunaan penelitian - Revisi data - Metode sample data - Langkah dalam data. - Daftar pustaka. 		

Medan, 17 Juni 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui serta menjelaskan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”. Dengan Metode sampel Jenuh, maka sampel diambil berdasarkan populasi yaitu 33 Kabupaten/Kota. Pendekatan dari Penelitian ini assosiatif kuantitatif dengan model regresi linear berganda. Data yang di dapatkan melalui pengumpulan data yang dikumpulkan melalui catatan dokumen resmi pemerintahan yang sudah dipublikasikan untuk umum dan diolah melalui bantuan aplikasi SPSS 16. Hasil data menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan Melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara . Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linear berganda yaitu $Y=67.397+0,255X_1-0,178X_2+e$ dimana jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 22,5% dan 17,8%. Dan hasil uji determinasi dari R square adalah sebesar 11,0% menunjukkan bahwa tingkat Kemandirian Keuangan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli dan Dana Perimbangan Melalui Indeks Kesejahteraan yang di proxikan dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 11,0% dan sisanya 89,0% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya diluar dari penelitian ini.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Indeks Kesejahteraan, dan Kemandirian Keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine and explain the Effect of Regional Original Revenue and Balancing Funds on the Level of Independence of Financial Management through District / City Welfare Index of North Sumatra Province ". With the Saturated sample method, the sample is based on the population of 33 districts / cities. The approach of this research is associative quantitative approach with multiple linear regression models. Data obtained through data collection are collected through official government document records that have been published publicly and processed through the help of SPSS 16 applications. The results of the data show that partially or simultaneously, the influence of income Regional Original and Balancing Funds on the Level of Independence of Financial Management have a positive and significant effect through the District / City Welfare Index of North Sumatra Province. This can be seen from the multiple linear regression equation $Y = 67,397 + 0,255X_1 - 0,178X_2 + e$ where if the Regional Original Revenue and the Balancing Fund have increased respectively by 22.5% and 17.8%. And the test results of the R square determination of 11.0% indicate that the level of Financial Independence is influenced by Original Income and Balance Funds through the Welfare Index proxied by the Human Development Index of 11.0% and the remaining 89.0% is influenced by factors or variables others outside of this research .

Keywords: Regional Original Income, Balancing Funds, Welfare Index, and Financial Independenc

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Pendapatan Asli Daerah	12
2. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah.....	13
3. Dana Perimbangan.....	16
4. Indeks Kesejahteraan Masyarakat	18
5. Tingkat Kemandirian Keuangan.....	20
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
1. Lokasi Penelitian	27
2. Waktu Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel	28
1. Populasi	28
2. Sampel.....	28

D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Pengujian Hipotesis	34

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Instansi Pemerintah Sumatera Utara .	41
a. Sejarah Ringkas	41
b. Visi dan Misi	42
c. Perioritas Pembangunan Sumatera Utara.....	43
d. Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	43
2. Analisis Deskriptif	44
3. Uji Asumsi Klasik	47
4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	52
5. Uji Hipotesis.....	53
6. Hasil Analisis Jalur.....	58
B. Pembahasan.....	69

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi 5 Kabupaten/Kota.....	4
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia	5
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	28
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	28
Tabel 3.2 Daftar Sampling	29
Tabel 3.3 Variable Operasional.....	30
Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara	43
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4.3 Hasil uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.4 Hasil uji Autokorelasi	49
Tabel 4.5 Hasil uji Multikorelitas	51
Tabel 4.6 Hasil uji Autokorelasi	52
Tabel 4.7 Hasil coefficients.....	52
Tabel 4.8 Analisis Jalur	54
Tabel 4.9 Uji Serempak	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik-Hipotesis Parsial.....	56
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi.....	58
Tabel 4.12 Analisis Jalur.....	58
Tabel 4.13 Uji serempak.....	59
Tabel 4.14 Uji Statistik-Hipotesis Parsial	61
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi	62
Tabel 4.16 Koefisien Korelasi Intervening	62
Tabel 4.17 Perbandingan Langsung/Tidak Langsung	63
Tabel 4.18 Koefisien Korelasi Intervening	64
Tabel 4.19 Perbandingan Langsung/Tidak Langsung	65
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	46
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram	47
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	48
Gambar 4.3 Hasil Uji Histogram	50
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas	50
Gambar 4.5 Asumsi Analisis Jalur.....	53
Gambar 4.6 Penggambaran substruktural 1.....	54
Gambar 4.7 Penggambaran substruktural 3.....	58
Gambar 4.8 penggambaran analisis PAD ke IPM	63
Gambar 4.9 penggambaran analisis DP ke IPM	65
Gambar 4.10 penggambaran analisis PAD,DP,IPM KE KKD.....	66
Gambar 4.11 Kerangka Konsep <i>PATH ANALYZE</i>	46

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”.

Pada kesempatan ini, mengingat banyaknya dukungan, bantuan dan bimbingan yang penulis terima selama penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Ibu Yunita Sari Rioni, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Kepada seluruh sahabat-sahabatku Akmal, Putri, Tria, Beny, Nila, Santi, Thalia, Nindia, Adit, Bobby. terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
7. kepada seluruh teman-teman se-Angkatan terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan

8. Kepada Hendra Robiyanshah terima kasih atas nasehat dan semangatnya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, September 2019

Penulis

Devika Nadya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu daerah pasti memiliki otonomi daerah masing-masing, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Kemandirian pengelolaan keuangan daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah . Didalam perimbangan pusat dan daerah keadilan politik dan keadilan ekonomi, seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang isinya pemerintah pusat tetap memegang tanggungjawab untuk sistem hukum, masalah keagamaan, pertahanan dan keamanan nasional, perencanaan ekonomi makro, masalah keuangan dan moneter, hubungan internasional dan standarisasi sementara tanggung jawab wajar lainnya dilimpahkan, pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki sumber daya, pemasukan dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang pemerintahan daerah.

Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berisi tentang perimbangan keuangan antara Daerah dan Pusat. Otonomi daerah didalam pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada bantuan dana dari pusat yang berupa dana perimbangan yang dikirim pusat ke daerah .Selanjutnya perubahan yang sangat mendasar pada pengelolaan keuangan telah terjadi pada

tahun 2001 tentang otonom dalam melaksanakan otonomi daerah yang melandasinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyangkut sumber daya manusia, sumber daya lain dan dana yang merupakan kekayaan daerah agar lebih mengoptimalkan potensi pengelolaan yang dimiliki daerah.

Dengan begitu pemerintah pusat mengharapkan pemerintahan dengan otonom daerah mampu mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat, serta semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri agar menjadi suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan maupun pembiayaan pembangunan perekonomian. pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintahan Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri (Julianti, et al 2012).

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus dipantau pertumbuhannya secara berkesinambungan

.Agar hal ini dapat dicapai tentunya harus dilakukan langkah-langkah yang ditindak lanjuti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup penting dalam untuk melakukan aktivitas pemerintahan,menentukan kemampuan daerah dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Tetapi, dalam kenyataanya masih banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif lebih rendah terhadap total penerimaan daerah. Namun, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari instansi lebih tinggi atau pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang masih sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kegiatan pembiayaan pembangunan daerah ini digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dan diharapkan dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan kata lain, pemerintah daerah dimotivasi agar meningkatkan kemampuan, potensinya seoptimal mungkin dalam membelanjakan urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada didaerah tersebut. Selain itu Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, dana perimbangan juga sebagai kontribusi terbesar diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 agar pemerintahan dapat mengatur dan mengelola keuangan serta mencapai target kemandirian untuk mengelola otonom daerah .

Terkait hal ini (Priradesi, 2009) menyatakan bahwa analisis rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan rasio kemandirian pemerintahan kabupaten dan kota Medan adalah rendah. Kemudian masih menyangkut hal ini pada tahun 2013-2017 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bersumber dari data Bps dari tahun 2013-2017 memberi gambaran seperti yang bisa dilihat dari Tabel dibawah memberikan potret beberapa Pendapatan asli daerah dan Dana perimbangan Kabupaten/Kota yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kab/kota dengan Dana Perimbangan atau Dana transfer. Dengan artian kemandirian keuangan daerah masih rendah dan belum mencapai tujuan Kemandirian pengelolaan keuangan daerah merupakan fenomena utama dari penelitian ini. Berikut gambar tabel disajikan pada Tabel 1.1 berikut :

Kab/Kota	Padang Sidempuan	Gunung Sitoli	Medan	Samosir	Pak Pak Bharat
Pendapatan Asli Daerah	78417754	29185405	1739756924	39268200	18748806
Dana Perimbangan	666941905	612805752	2122769417	592629074	43874823

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 5 kabupaten

Bisa disimpulkan bahwa dari tabel diatas menggambarkan tingginya dana perimbangan dibanding dengan pendapatan asli daerahnya dari beberapa Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara demikian juga halnya dengan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dimana Pendapatan Asli Daerah untuk jangka panjang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara agar dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan.

Besarnya pembagian anggaran yang dialokasikan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini menggambarkan bahwasannya masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat yang dapat dilihat dari dana perimbangan yang diperoleh pada tahun 2017. Tentunya tujuan dari pengalokasian dana tersebut yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan sebagai hal yang penting pada proses perencanaan pembangunan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengamati kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sebagai proses dalam memperluas beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli. Berikut disajikan data tabel indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara

Id_wilayah	Wilayah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1200	Sumatera Utara	68,36	68,87	69,51	70	70,57

Sumber : www.bps.go.id

Data di atas menggambarkan indikator kesejahteraan manusia di Provinsi Sumatera Utara yang meningkat tiap tahunnya artinya ada perkembangan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara namun yang menjadi masalah adalah pemerataan pembangunan yang belum merata yang dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia di beberapa daerah di Sumatera Utara. Berdasarkan uraian serta pemikiran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti,

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Masih rendahnya pendapatan asli daerah dalam memberikan kontribusi pada tingkat kemandirian pengelolaan keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera utara.
- b. Masih adanya ketergantungan dana perimbangan dalam memberikan kontribusi tingkat kemandirian pengelolaan keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
- c. Pemerataan pembangunan yang belum merata yang dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia di beberapa daerah di Sumatera Utara.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas serta menyimpang dari tujuannya, yaitu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian pengelolaan keuangan melalui Indeks Kesejahteraan kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ?
3. Apakah Indeks kesejahteraan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ?
4. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ?
5. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ?
6. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2013-2017 ?
7. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2013-2017 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ?
- b. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ?
- c. Apakah Indeks kesejahteraan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ?
- d. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ?
- e. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017?
- f. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2013-2017 ?
- g. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2013-2017 ?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya :

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan

secara bersama-sama terhadap terhadap tingkat kemandirian pengelolaan keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi informasi kepada pihak pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola keuangan Kabupaten/kota Sumatera Utara.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Muliana, 2009) yang berjudul : Pengaruh rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu pengaruh rasio Efektivitas Pendapatan Daerah, Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Dan variabel terikat tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dan penelitian sekarang menggunakan variabel bebas yaitu Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dan variabel terikat terhadap tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Waktu Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2009 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2018.
3. Model Penelitian : Dalam penelitian terdahulu menggunakan model analisa regresi berganda dan penelitian sekarang menggunakan model analisa regresi linier berganda . perbedaan model penelitian, variabel penelitian, waktu dan lokasi penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlakubertujuan untuk memberikan kelulasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan kemampuan melaksanakan ekonomi sendiri. Pendapatan Asli Daerah ini sendiri perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kemandirian otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dari penerimaan daerah tersebut. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang berisi tentang “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desantralisasi”.

Kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah. “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”. Menurut (Mahmudi,

2010). Dari definisi di atas dapat disimpulkan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat penting peran dan pengaruhnya terhadap pembiayaan dan pendanaan daerah sendiri agar terciptanya tingkat pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan tingkat kemandirian yang baik.

b. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Terkandung di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli daerah Terdiri Dari :

1) Pajak Daerah

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, menurut Mariot berdasarkan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah .

dan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a) pajak hotel
- b) pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) pajak reklame
- e) pajak penerangan jalan

- f) pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) pajak parkir
- h) pajak air tanah
- i) pajak sarang burung walet
- j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan
- k) pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Selain itu jenis-jenis retribusi daerah :

- 1) Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum dan jenis-jenis retribusi jasa umum :
 - a) retribusi pelayanan kesehatan
 - b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
 - d) retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
 - e) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f) retribusi pelayanan pasar
 - g) retribusi pengujian kendaraan bermotor

- h) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j) retribusi penyediaan dan atau penyedeton kakus
 - k) retribusi pengolahan limba cair
 - l) retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - m) retribusi pelayanan pendidikan, dan
 - n) retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 2) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Jenis-jenis retribusi usaha dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 meliputi :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan aau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Rertribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa
- g) Rertribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi tempat pelayanan kepelabuhan
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi penyebrangan di air dan
- k) Retribusi penjualan usaha daerah

- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dna menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 meliputi:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat jualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek dan
- e) Retribusi izin usaha periklanan

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini di rinci menurut objek pendapatan mencakup :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu. Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.

Lain-lain pendapatan asli daerah sah seperti yang dimaksud meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagian akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- 6) Hasil pajak daerah
- 7) Hasil retribusi daerah
- 8) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- 9) Lain-lain pendapatan asli yang sah.

2. Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Menurut (Darise, 2009).

b. Sumber Dana Perimbangan

Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pemerintahan daerah menyatakan Dana Perimbangan meliputi :

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil bersumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAU juga dimaksud untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat (Panggabean, 2014:13).

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, “ dana alokasi khusus selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Dari definisi diatas tentang dana perimbangan dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan sifatnya adalah sebagai dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu mendanai kegiatan daerah namun pemerintah pusat mengharapkan pemerintahan daerah meningkatkan kemandirian pengelolaan keuangannya sendiri.

3. Indeks Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan sebagai hal yang penting pada proses perencanaan pembangunan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengamati kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sebagai proses dalam memperluas beragam pilihan untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli (Nehen, 2012:82). Sedangkan menurut *United Nation for Development Program* (UNDP) dalam Swandewi (2014:6), menyatakan pembangunan manusia adalah model pembangunan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara menumbuhkan dan memperluas pilihan bagi masyarakat. Perkembangan kesejahteraan masyarakat semestinya dipantau oleh pemerintah agar pemerintah dapat merencanakan perbaikan pada sisi atau komponen kesejahteraan masyarakat yang masih minim atau kurang. Pemerintah daerah maupun masyarakat Provinsi Bali dalam melihat dan mengamati perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (*United Nations Development Programme*, 2010). Pembangunan manusia memiliki dua sisi: *pertama*, fungsi dari keberdayaan manusia dan *kedua*, pemakaian keberdayaan itu untuk keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi (UNDP, 2009).

Pendekatan pembangunan manusia tidak semata-mata menjadi sebuah tujuan, namun merupakan sebuah proses. UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu pemerataan (*equity*), produktivitas (*productivity*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kesinambungan (*sustainability*) (Ardiansyah dan Widyaningsih, 2014). Peningkatan IPM tidak semata-mata hanya pada

pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Pertumbuhan ekonomi sejalan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Pembangunan Manusia di Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan UNDP yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pembangunan manusia merupakan bagian dari tujuan nasional. Peningkatan IPM tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata, namun diperlukannya pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut.

4. Tingkat Kemandirian Keuangan

Menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Kemandirian keuangan berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut (Amalia et al., 2014). Sementara itu, kemandirian keuangan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dapat

menunjukkan kontribusi yang besar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dimana kedua hal tersebut merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. (Ulum, 2009).

Tujuan kemandirian pengelolaan keuangan daerah ialah mengukur sudah baik atau tidaknya suatu pemerintahan daerah ditandai dengan semakin tingginya kemandirian keuangan tentu menggambarkan tingkat pengelolaan keuangan yang baik pada daerah tersebut dan kurangnya tingkat ketergantungan pendanaan dari pihak eksternal dan pusat dalam otonomi daerah untuk mengatur keuangan sendiri. Untuk mengukur Kemandirian Pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan rasio Kemandirian sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Daerah}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis telah jadikan referensi adalah berikut ringkasan tabel dari peneliti-peneliti terdahulu:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Ni Kadek Herni Wijayanti1 Ida Bagus Darsana2 (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi	X1 = PAD X2 = DAU Z = Pertumbuhan Ekonomi Y = Kesejahteraan	Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAU tidak

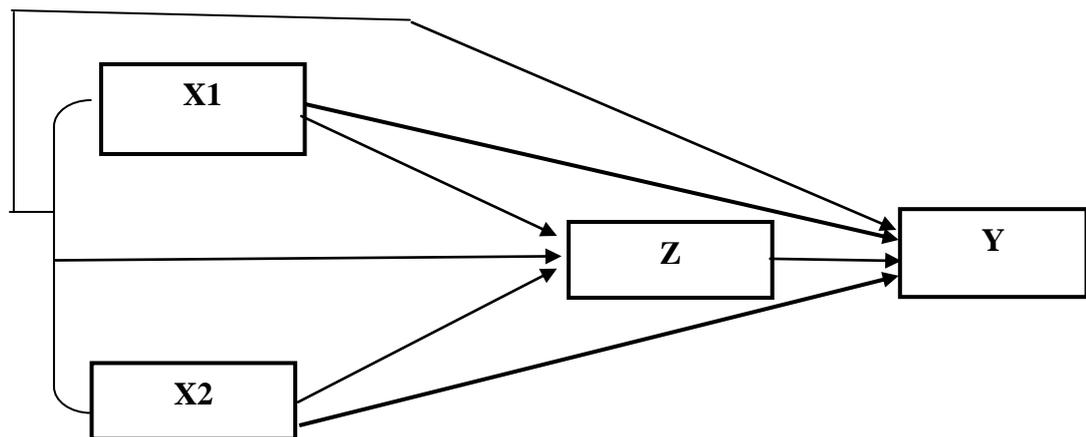
		Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2008-2013)			berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang memediasi secara penuh dalam pengaruh PAD dan DAU terhadap kesejahteraan masyarakat
2	Nindya Maharditya (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014)	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAU Z = DBS Y = IPM	Kuantitatif	PAD dan DAK berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan DAU dan DBH berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal.

3	Ayu Priradesi (2009)	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Sumatera	X_1 =Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Y = Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara	Analisis Deskriptif	Data Yang Dilakukan Menunjukkan Bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Adalah Rendah Sekali Atau Secara Finansial Atau Belum Mandiri.
4	Debby Debora (2010)	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintahan Kota Medan	X_1 =Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Y = Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintahan Kota Medan	Analisis Deskriptif	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Dari Tahun 2008 - 2012 Dengan Kriteria Kemampuan Kuangan Daerah Sedang.
5	Muliayana (2009)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara	X_1 = Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah X_2 =Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Y = Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara	Regresi Berganda	Secara Parsial PAD Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Positif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Singnifikan Negatif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .Secara Simultan Rasio Efektivitas PAD,DAU Dan DAK Mempunyai

					Pengaruh Signifikan Positif Terhadap Tingkat Kemandirian.
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan suatu kajian dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang terlebih dahulu. Dengan adanya kebijakan Undang-Undang terbaru tentang otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah harus siap mengatur keuangan serta mampu mengali, dan membiayai sendiri segala keperluan dan kegiatan daerahnya. Dana bisa bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, kemudian dilihat pula seberapa pengaruhnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima dari pusat apakah berpengaruh positif dan negatif terhadap indeks kesejahteraan masyarakat provinsi tersebut dan apa dampaknya terhadap tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara tersebut apakah Tingkat Kemandirian Semakin Tinggi atau sebaliknya. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Keterangan :

X1: Pendapatan Asli Daerah (*independent variabel*)

X2: Dana Perimbangan (*independent variabel*)

Z : Indeks Pembangunan anusia (*intervening variabel*)

Y : Tingkat Kemandirian (*dependent variabel*)

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas,hipotesis penelitian ini adalah

1. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

3. Indeks Kesejahteraan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara .
4. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
5. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
6. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
7. Dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala Rusiadi (2013:14). Penelitian ini dilakukan membuktikan dan mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengakses Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD Selama Periode 2013-2017 Sumatera Utara. Dengan mengamati laporan realisasi pada website pemerintah di *www.bps.pemprovsumu.go.id*

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian dan penjelasan dari tabel jadwal penelitian tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun													
		Oktober- November 2018			Desember- Januari 2019			Februari-Maret 2019			Mei-Juni 2019			Juli- Agustus 2019	
1	Risetawal/Pengajuan Judul	■													
2	Penyusunan Proposal				■										
3	Seminar Proposal										■				
4	PerbaikanAcc Proposal										■				
5	Pengolahan Data										■				
6	PenyusunanSkripsi													■	
7	BimbinganSkripsi														■
8	MejaHijau														■

Sumber : Penulis (2019)

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”populasi dalam penelitian ini adalah 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menggunakan Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2017”.

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan Sampel Jenuh ,Yaitu teknik pengambilan sampel adalah dari semua populasi yang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut maka, maka Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 Kabupaten dan kota dan dalam kurun waktu 5 tahun. Daftar sampel penelitian ini dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.2 Daftar Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kriteria Sampling

No	Kabupaten/Kota	Kriteria		Sampel
		1	2	
1	Kabupaten Nias	√	√	Sampel 1
2	Kabupaten Mandailing Natal	√	√	Sampel 2
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	√	√	Sampel 3
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	√	√	Sampel 4
5	Kabupaten Tapanuli Utara	√	√	Sampel 5
6	Kabupaten Toba Samosir	√	√	Sampel 6
7	Kabupaten Labuhan Batu	√	√	Sampel 7
8	Kabupaten Asahan	√	√	Sampel 8
9	Kabupaten Simalungun	√	√	Sampel 9
10	Kabupaten Dairi	√	√	Sampel 10
11	Kabupaten Karo	√	√	Sampel 11
12	Kabupaten Deli Serdang	√	√	Sampel 12
13	Kabupaten Langkat	√	√	Sampel 13
14	Kabupaten Nias Selatan	√	√	Sampel 14
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	√	√	Sampel 15
16	Kabupaten PakPak Barat	√	√	Sampel 16
17	Kabupaten Samosir	√	√	Sampel 17
18	Kabupaten Serdang Berdagai	√	√	Sampel 18
19	Kabupaten Batu bara	√	√	Sampel 19
20	Kabupaten Padang lawas utara	√	√	Sampel 20
21	Kabupaten Padang lawas	√	√	Sampel 21
22	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	√	√	Sampel 22
23	Kabupaten Labuhan Batu Utara	√	√	Sampel 23
24	Kabupaten Nias Utara	√	√	Sampel 24
25	Kabupaten Nias Barat	√	√	Sampel 25
26	Kabupaten Sibolga	√	√	Sampel 26
27	Kota Tanjung Balai	√	√	Sampel 27
28	Kota Pematang Siantar	√	√	Sampel 28
29	Kota Tebing Tinggi	√	√	Sampel 29
30	Kota Binjai	√	√	Sampel 30
31	Kota Medan	√	√	Sampel 31
32	Kota Padang Sidempuan	√	√	Sampel 32
33	Kota Gunung sitoli	√	√	Sampel 33

Penelitian ini dilakukan dengan mengunduh data dari website Badan Pusat Statistik Provinsi berupa data yang diolah dan di publikasikan.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang akan menjadi fokus dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu : variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup variabel penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan instrument/alat ukur.

Adapun definisi operasional dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3 Variabel Operasional

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	Ln Total Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan didalam daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (Sumber:Undang-undang nomor 33 tahun 2004)	Nominal

Variabel	Indikator	Deskripsi	Rasio
Dana Perimbangan	Ln Total Dana Perimbangan	Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Menurut (Darise, 2009).	Nominal
Kesejahteraan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. (Badan Pusat Statistik, 2019).	Skala
Kemandirian pengelolaan Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Transfer pusat + provinsi + pinjaman}}$ (sumber:Mahmudi:2010:142)	Kemandirian keuangan berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi (sumber: Menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2004)	Rasio

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran dan laporan anggaran keuangan masing-masing Kabupaten/Kota tahunan yang telah di *release* resmi untuk umum pada periode penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh peneliti dari situs *www.Bps.pemprovsumba.go.id*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Dokumentasi penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui catatan dokumen resmi pemerintahan yang sudah dipublikasikan untuk umum. Serta mengumpulkan dari berbagai hal media cetak yang membahas semua yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian pengelolaan keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model regresi liner berganda (*multiple regression*) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan dan upah terhadap kepuasan kerja dan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi (*intervening*) yaitu kinerja dalam memediasi variabel *independent* terhadap variabel *dependent* yaitu kepuasan kerja. Yang dapat

dihitung dengan bantuan perangkat lunak *statistical product and service solution* variabel ini menggunakan dua kali regresi berganda. Dimana sesuai dengan kerangka konseptual terdiri dari dua persamaan struktural, dimana variabel X_1 dan X_2 adalah variabel eksogen dan Z serta Y adalah variabel endogen (**Rusiadi et al, 2013:224**), dengan persamaan sebagai berikut :

$$1. X_1 + X_2 + e = Y$$

$$2. X_1 + X_2 + Z + e = Y$$

Keterangan :

Y = Kemandirian (*Dependen Variable*)

X_1 = PAD (*Independent Variable*)

X_2 = DP (*Independent Variable*)

Z = Kesejahteraan (*Intervening Variable*)

Sebelum dianalisis dan dievaluasi, terlebih dahulu data di uji dengan :

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali dalam Rusiadi, 2013 : 164). Asumsi

normalitas dapat diperiksa dengan pemeriksaan output normal P-P plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika penyebaran titik-titik output plot mengikuti garis diagonal plot.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Baihaqi, 2010:68). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2.

H. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dimaksud mana dalam penelitian yang telah

dikemukakan dalam hipotesis sebelumnya, maka dilakukan pengujian simultan dan berikut uji parsial atau individu serta pengujian pengaruh mediasi (*Intervening*), guna mengetahui kebenarannya :

1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependent (Baihaqi, 2010:70). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kesejahteraan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara dengan level pengujian 5% pada pengujian hipotesis digunakan:

a. $X_1, X_2 + Z$

Pengaruh Serempak (*simultant*) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Kesejahteraan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$

Artinya tidak dapat pengaruh serempak Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Kesejahteraan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

$H_1 = \text{Minimal } 1 \neq 0$

Artinya terdapat Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Kesejahteraan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

Terima H_0 (tolak H_1), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha 5\%$

Terima H_0 (terima H_1), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha 5\%$

b. $X_1, X_2, Z + Y$

Pengaruh Serempak (*simultant*) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Kesejahteraan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ Artinya tidak dapat pengaruh serempak Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Kesejahteraan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara..

$H_1 = \text{Minimal } 1 \neq 0$ Artinya terdapat pengaruh serempak Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Kesejahteraan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

Terima H_0 (tolak H_1), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha 5\%$

Terima H_0 (terima H_1), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha 5\%$

2. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variable dependent (Baihaqi, 2010:70).

Pengaruh Parsial individu variabel bebas terdapat variabel terikat adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kesejahteraan.

$X_1, X_2 + Z$

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang signifikan terhadap Indeks Kesejahteraan.

$H_1 = \beta_1 \neq 0$ Artinya terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang signifikan terhadap Indeks Kesejahteraan.

Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :

Terima H_0 (tolak H_1), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{sig } t > \alpha 5\%$

Terima H_1 (tolak H_0), apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{sig } t < \alpha 5\%$

- 2) Dana Perimbangan terhadap Indeks Kesejahteraan.

$X_1, X_2, + Z$

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya tidak terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Kesejahteraan

$H_1 = \beta_1 \neq 0$ Artinya terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Kesejahteraan.

Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :

Terima H_0 (tolak H_1), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{sig } t > \alpha 5\%$

Terima H_1 (terima H_0), apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{sig } t < \alpha 5\%$

- 3) Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

$X_1, X_2, + Y$

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

$H_1 = \beta_1 \neq 0$ Artinya terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :

Terima H_0 (tolak H_1), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{sig } t > \alpha 5\%$

Terima H_1 (terima H_0), apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{sig } t < \alpha 5\%$

- 4) Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

$X_1, X_2, + Y$

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya tidak terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

$H_i = \beta_1 \neq 0$ Artinya terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :

Terima H_0 (tolak H_i), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{sig } t > \alpha 5\%$

Terima H_0 (terima H_i), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{sig } t > \alpha 5\%$

5) Indeks Kesejahteraan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

$X_1, X_2, Z + Y$

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya tidak terdapat pengaruh Indeks Kesejahteraan yang signifikan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

$H_i = \beta_1 \neq 0$ Artinya terdapat pengaruh Indeks Kesejahteraan yang signifikan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :

Terima H_0 (tolak H_i), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{sig } t > \alpha 5\%$

Terima H_0 (terima H_i), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{sig } t > \alpha 5\%$

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Dalam

bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara

a. Sejarah Ringkas

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I.

pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

b. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

1) Visi

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat

2) Misi

- a) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- b) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- c) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- d) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- e) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

c. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara

- 1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
- 2) Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
- 4) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
- 5) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

d. Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Nias	18	Kabupaten Serdang Berdagai
2	Kabupaten Mandailing Natal	19	Kabupaten Batu bara
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	20	Kabupaten Padang lawas utara
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	21	Kabupaten Padang lawas

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
5	Kabupaten Tapanuli Utara	22	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
6	Kabupaten Toba Samosir	23	Kabupaten Labuhan Batu Utara
7	Kabupaten Labuhan Batu	24	Kabupaten Nias Utara
8	Kabupaten Asahan	25	Kabupaten Nias Barat
10	Kabupaten Simalungun	26	Kabupaten Sibolga
11	Kabupaten Dairi	27	Kota Tanjung Balai
12	Kabupaten Karo	28	Kota Pematang Siantar
13	Kabupaten Deli serdang	29	Kota Tebing Tinggi
14	Kabupaten Nias Selatan	30	Kota Medan
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	31	Kota Binjai
16	Kabupaten PakPak Barat	32	Kota Padang Sidempuan
17	Kabupaten Samosir	33	Kota Gunung Sitoli

Sumber : <http://www.sumutprov.go.id>

2. Analisis Deskriptif

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	165	7.22E6	1.53E10	1.8325E8	9.21005E8
DP	165	5.57E7	1.16E10	8.5239E8	1.0690E9
KEMANDIRIAN	165	.00	6.07	.1586	.48875
IPM	165	56.58	79.98	68.3369	4.87232
Valid N (listwise)	165				

Sumber : www.bpspemprovsumut.go.id (OlahData Laporan Keuangan periode 2013-2017)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui data deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan, dan Tingkat Kesejahteraan Manusia (Index Pembangunan Manusia) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jumlah N (sampel) pada penelitian ini adalah 165.

Nilai minimum untuk variabel Pendapatan Asli Daerah yaitu 72228748 yang merupakan PAD Kabupaten Samosir pada tahun 2017 hal ini menggambarkan bahwasannya sumber PAD Kabupaten Samosir masih rendah disbanding dengan rata – rata pendapatan kota dan kabupaten lainnya, nilai maksimum variabel PAD yaitu 15388658 yang merupakan PAD Kabupaten Pak Pak Bharat yang menggambarkan bahwasannya Kabupaten Pak Pak Bharat memiliki sumber pendapatan daerah yang tinggi. PAD memiliki nilai rata-rata sebesar 9.21005E8 dengan standar deviasi sebesar 2.20264E8 yang menunjukkan bahwa besar peningkatan maksimum dari rata-rata variabel PAD adalah +1.8325E8 dan penurunan maksimum rata-rata variabel PAD adalah sebesar -1.8325E8 atau dapat dikatakan bahwa rata-rata nilai penyimpangan PAD adalah sebesar 22%. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Pendapatan Asli Daerah ini sendiri perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kemandirian otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dari penerimaan daerah tersebut.

Nilai minimum untuk variabel Dana Perimbangan yaitu 55706647 yang merupakan DP Kabupaten Nias Utara pada tahun 2017, nilai maksimum variabel DP yaitu 11565271497 yang merupakan DP Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 hal ini menggambarkan besarnya kucuran dana baik dari pusat maupun provinsi terhadap daerah Kota Langkat yang memiliki PAD yang rendah. Dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan

untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah.

Nilai minimum untuk variabel Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan yaitu 0,008 yang merupakan Kemandirian Kabupaten Dairi pada tahun 2016, nilai maksimum variabel Kemandirian yaitu 0,67 yang merupakan Kemandirian Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2013. Data tersebut menggambarkan bahwasannya Kemandirian Kabupaten Mandailing Natal masih rendah dan masih bergantung terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus maupun transfer pusat. Tujuan kemandirian pengelolaan keuangan daerah ialah mengukur sudah baik atau tidaknya suatu pemerintahan daerah ditandai dengan semakin tingginya kemandirian keuangan tentu menggambarkan tingkat pengelolaan keuangan yang baik pada daerah tersebut dan kurangnya tingkat ketergantungan pendanaan dari pihak eksternal dan pusat dalam otonomi daerah untuk mengatur keuangan sendiri.

Nilai minimum untuk variabel IPM yaitu 56,58 yang merupakan IPM Kabupaten Nias Barat pada tahun 2013 yang menggambarkan indeks kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan IPM rata-rata kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara, nilai maksimum variabel IPM yaitu 78,79 yang merupakan IPM Kota Medan pada tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwasannya Kota Medan memiliki indeks kesejahteraan yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017. Semakin tinggi indeks ini semakin mencerminkan

pembangunan manusia yang atau sumber daya manusia yang berkualitas dan cerdas.

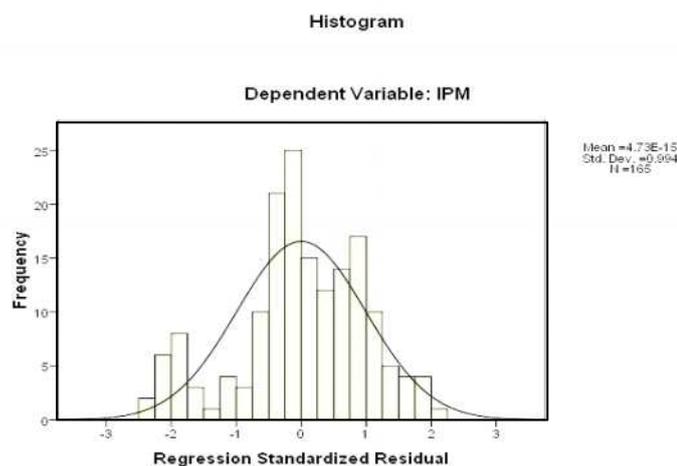
3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Data yang diperoleh dari bps, selanjutnya akan diuji dengan uji asumsi klasik sebagai berikut:

a. Hasil Uji Asumsi Klasik Substruktur I

1) Hasil Uji Normalitas Substruktur I

Hasil uji normalitas pada substruktur I diinterpretasikan dengan melihat grafik Histogram. Adapun hasil uji histogram dalam penelitian adalah sebagai berikut:

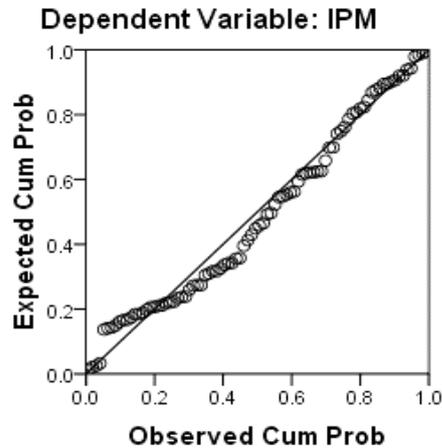


Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram

Berdasarkan gambar histogram menunjukkan hasil uji normalitas berdasarkan grafik histogram menunjukkan data terdistribusi normal karena kurva grafik histogram membentuk lonceng sempurna.

Adapun hasil uji PP Plot dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

2) Hasil Uji Multikolinearitas Substruktur I

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.977	1.024
DP	.977	1.024

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai *tolerance* lebih dari 0,977 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian ini memenuhi ketentuan uji multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.333 ^a	.111	.100	4.62416	.420

a. Predictors: (Constant), PAD, DP

b. Dependent Variable: IPM

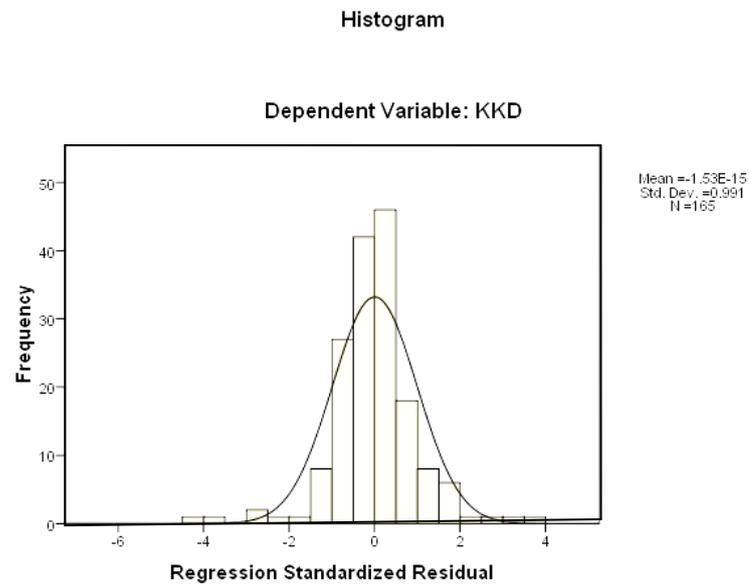
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa angka Durbin Watson $0,402 < 2$, sehingga terbebas dari autokorelasi

b. Hasil Uji Asumasi Klasik Substruktur II

1) Hasil Uji NormalitasSubstruktur II

Hasil uji normalitas pada substruktur I diinterpretasikan dengan melihat grafik Histogram. Adapun hasil uji histogram dalam penelitian adalah sebagai berikut:

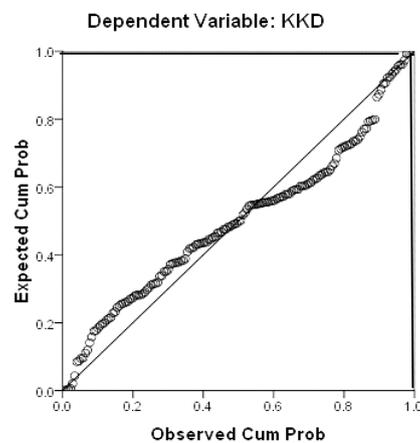


Gambar 4.3 Hasil Uji Histogram

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan hasil uji normalitas berdasarkan grafik histogram menunjukkan data terdistribusi normal karena kurva grafik histogram membentuk lonceng sempurna.

Adapun hasil uji PP Plot dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.4 PP Plot Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data untuk variabel Kemandirian yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

2) Hasil Uji Multikolinearitas Substruktur II

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.977	1.024
DP	.977	1.024
IPM	.977	1.024

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.5 Diperoleh nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian ini memenuhi ketentuan uji multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2.

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.9872 ^a	.974	.974	.07951	1.919

a. Predictors: (Constant), PAD, DP, IPM

b. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa angka Durbin Watson $1,919 < 2$, sehingga terbebas dari autokorelasi

4. Analisis Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression*)

Tabel 4.7.
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	67.397	.462		145.964	.000
	PAD	.019	.000	.255	3.399	.001
	DP	8.126E-10	.000	.178	2.379	

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Lampiran Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + e.$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

a. $\alpha = 67.397$

Nilai konstanta sebesar 67.397 artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan bernilai 0, maka variabel IPM bernilai 67.397.

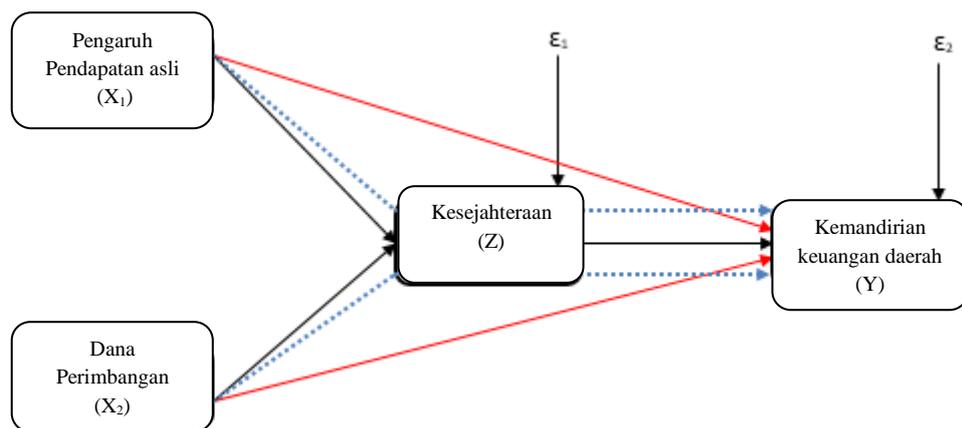
b. $\beta_1 = 0,255$

Konstanta β_1 bernilai 0,255 menjelaskan bahwa apabila variabel PAD meningkat satu satuan, maka variabel IPM akan menaik sebesar 0,255

c. $\beta_2 = 178$

Konstanta β_1 bernilai 178 menjelaskan bahwa apabila variabel DP meningkat satu satuan, maka variabel IPM akan menurun sebesar 178.

5. Pengujian Hipotesis



Gambar 4.5.
Penggambaran Asumsi Analisis Jalur

Model di atas akan diuraikan menjadi empat sub struktural sebagai berikut :

Sub struktural 1 : $Z = PX_1 + PX_2 + \epsilon_1$

Sub struktural 2 : $Y = PZ + \epsilon_2$

Sub struktural 3 : $Y = PX_1 + PX_2 + \epsilon_3$

Sub struktural 4 : $Y = PZX_1 + PZX_2 + \epsilon_3$

Keterangan :

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Perimbangan

Z = Indeks pembangunan manusia

Y = Kemandirian keuangan keuangan

ϵ = Faktor lain diluar X dan Y

P = Koefisien Jalur

a. Pengujian Hipotesis Jalur Pertama

Pengujian analisis jalur pertama bertujuan untuk mengetahui arah hubungan variabel bebas terhadap variabel mediator. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8.
Analisis jalur Pertama
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	67.397	.462		145.964	.000
PAD	.019	.000	.255	3.399	.001
DP	8.126E-10	.000	.178	2.379	

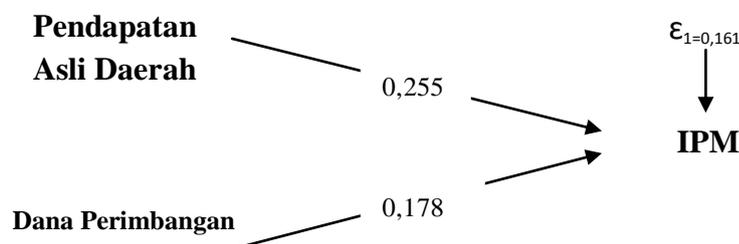
a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Lampiran Output SPSS

Informasi yang ditampilkan pada hasil regresi berganda adalah persamaan regresi berganda antara variabel independen (X) terhadap variabel Intervening (Z) yang dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut ini:

$$Z = PX_1 + PX_2 + \varepsilon_1$$

$$Z = 0,255X_1 + 0,178X_2 + 0,161\varepsilon_1$$



Gambar 4.6.
Penggambaran Asumsi Analisis Jalur
Substruktural pertama

Berdasarkan hasil regresi berganda ditemukan bahwa :

- 1) Nilai konstanta sebesar 67.397 artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan bernilai 0, maka variabel IPM bernilai 67.397.
- 2) Nilai koefisien Beta variabel Pendapatan Asli daerah adalah sebesar 0,255 artinya setiap kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 25,5% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 3) Nilai koefisien Beta variabel Dana Perimbangan adalah 0,178 artinya setiap kenaikan variabel Dana Perimbangan maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 17,8% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

a) Uji Signifikansi Simultan

Hasil pengujian statistik F (uji simultan) pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9.
Uji Serempak (F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	430.292	2	215.146	10.061	.000 ^a
Residual	3464.275	162	21.384		
Total	3894.567	164			

a. Predictors: (Constant), DP, PAD

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Lampiran Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh secara simultan pengaruh Dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap indeks Pembangunan Manusia diperoleh nilai signifikansi 0,000 (Sig <0,05) maka H₀ ditolak. Artinya

Dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks Pembangunan Manusia.

b) Uji Signifikansi Parsial

Hasil pengujian statistik t (uji parsial) pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.10.
Hasil Uji Statistik t – Hipotesis Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	67.412	.462		145.990	.000
PAD	1.347E-9	.000	.245	3.394	.001
DP	8.135E-10	.000	.179	2.382	.018

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Lampiran Output SPSS

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil pengujian hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh nilai signifikansi 0,001 (Sig.<0,05) maka H₀ ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara .

2) Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil pengujian hipotesis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh nilai signifikansi 0,018 (Sig.<0,05) maka H₀ ditolak. Artinya Dana Perimbangan

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara .

c) Koefisien Determinasi

Uji Statistik koefisien determinasi pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11.
Koefisien Determinasi – Hipotesis Pertama

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.332 ^a	.110	.100	4.62433

a. Predictors: (Constant), DP, PAD

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Lampiran Output SPSS

Tabel 4.11. memperlihatkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,110 atau 11,0% yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar nilai koefisien determinasi atau 11,0%. Sedangkan sisanya 89,0% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Pengujian Hipotesis Jalur Kedua

Pengujian analisis jalur ketiga bertujuan untuk mengetahui arah hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat Kemandirian Keuangan . Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12.
Analisis Jalur Kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.059	.091		.642	.522
PAD	5.286E-10	.000	.993	74.628	.000
DP	-2.459E-11	.000	-.054	-4.115	.000
IPM	.000	.001	.272	.244	.808

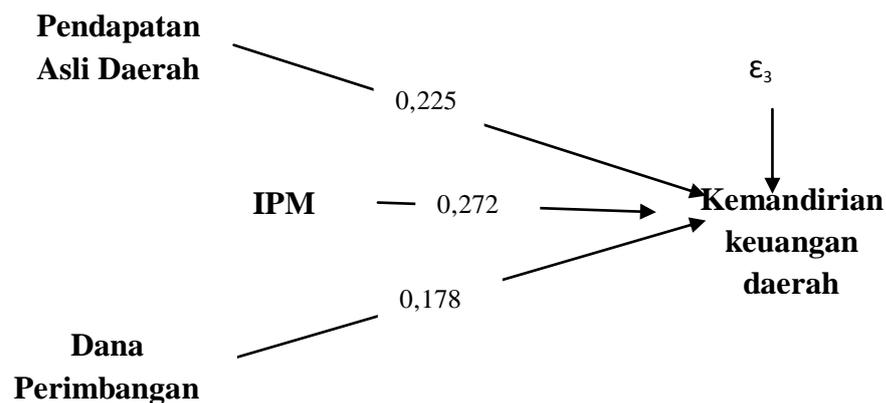
a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Lampiran Output SPSS

Informasi yang ditampilkan pada hasil regresi berganda adalah persamaan regresi berganda antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut ini:

$$Y = PX_1 + PX_2 + PZ + \epsilon_3$$

$$Y = 0,225X_1 + 0,178X_2 + 0,272Z + \epsilon_3$$



Gambar 4.7
Penggambaran Asumsi Analisis Jalur Substruktural Ketiga

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa :

- 1) Nilai konstanta sebesar 0.059 artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia bernilai 0 maka Kinerja bernilai sebesar 0.059.

- 2) Nilai koefisien Beta untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,225 artinya setiap kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah maka Kemandirian Keuangan akan meningkat sebesar 22,5% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 3) Nilai koefisien Beta untuk variabel Dana Perimbangan adalah sebesar 0,178 artinya setiap kenaikan variabel Dana Perimbangan maka Kemandirian Keuangan akan meningkat sebesar 17,8% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 4) Nilai koefisien Beta untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 0,272 artinya setiap kenaikan variabel Indeks Pembangunan Manusia maka Kemandirian Keuangan akan meningkat sebesar 27,2% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

a) Uji Signifikansi Simultan

Hasil pengujian statistik F (uji simultan) pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13.
Uji Serempak (F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.158	3	12.719	2.012E3	.000 ^a
	Residual	1.018	161	.006		
	Total	39.176	164			

a. Predictors: (Constant), IPM, PAD, DP

b. Dependent Variable: KKD

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil pengujian hipotesis secara simultan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemandirian keuangan diperoleh nilai signifikansi 0,000 (Sig

<0,05) maka H_0 ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

b) Uji Signifikansi Parsial

Hasil pengujian statistik t (uji parsial) pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14.
Hasil Uji Statistik t – Hipotesis Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.059	.091		.642	.522
PAD	5.268E-10	.000	.993	74.628	.000
DP	-2.459E-11	.000	-.054	-4.115	.000
IPM	.000	.001	.272	.244	.808

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Lampiran Output SPSS

1). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil pengujian hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh nilai signifikansi 0,000 (Sig.<0,05) maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

2). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil pengujian hipotesis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan diperoleh nilai signifikansi

0,000(Sig<0,05) maka H0 ditolak. Artinya Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

3). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil pengujian hipotesis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemandirian Keuangan diperoleh nilai signifikansi 0,808 (Sig>0,05) maka H0 diterima. Artinya Indeks Pembangunan Manusia Budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

c) Koefisien Determinasi

Uji Statistik koefisien determinasi pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15.
Koefisien Determinasi – Hipotesis Ketiga

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 ^a	.974	.974	.07951

a. Predictors: (Constant), PAD, DP

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Lampiran Output SPSS

Tabel 4.15. memperlihatkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,974 atau 97,4% yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan) terhadap Kinerja adalah sebesar nilai koefisien determinasi atau 97,4%. Sedangkan sisanya 2,6%

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

c. Pengujian Hipotesis Jalur Ketiga

1). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Melalui Indeks Pembangunan Manusia

Agar dapat membuktikan bahwa variabel Indeks pembangunan Manusia mampu menjadi variabel yang memediasi antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan, maka akan dilakukan perhitungan pengaruh langsung. Apabila pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks pembangunan Manusia lebih besar dibanding pengaruh secara langsung, maka Indeks pembangunan Manusia bisa menjadi variabel yang memediasi (intervening). Terlebih dahulu dihitung nilai pengaruh tidak langsung/ *Indirect Effect* (IE) pada variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai berikut :

Tabel 4.16.
Koefisien Korelasi Variabel Intervening

Model	Koefesien Jalur	t	p	R2	ϵ
Sub structural 1 (X1 ke Z)					
X1 (pZX1)	0.255	3.399	0.001	0.218	0.890
Sub structural 2 (X1,Z ke Y)					
X1 (pyX1)	0.994	77.534	0.000	0.974	0.026
Z (pyZ)	0.272	3.602	0.000	0.974	0.026

Sumber: Data Hasil Penelitian 2019 (Diolah)

Besarnya pengaruh tidak langsung/ *Indirect Effect* (IE) Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Indirect Effect (IE)} &= (pZX_1) (pYZ) \\ &= 0,255 \times 0,272 = 0.069 \end{aligned}$$

$$X_1 \rightarrow Z \rightarrow Y = (p_{YX_1}) + (IE)$$

$$= 0.994 + 0.069 = 1.063$$

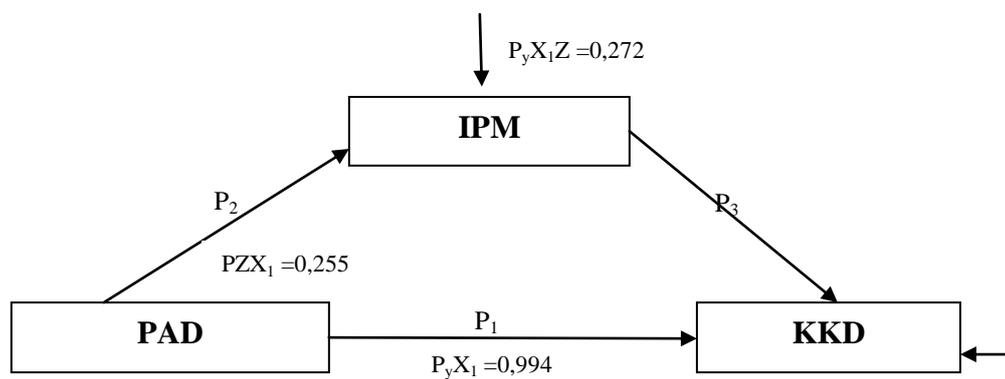
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Melalui Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dijelaskan berikut ini :

Tabel 4.17.
Perbandingan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	<i>Direct Effect</i>	<i>Indirect Effect</i>	Total Effect
X ₁	0.994	0.069	1,063

Sumber: Data Hasil Penelitian 2019 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.17 hasil pengujian hipotesis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia lebih besar dibanding pengaruh langsung yaitu $0.994 > 0,069$ dengan nilai signifikansi 0,000 (Sig. < 0,05) maka H_0 ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening pada terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.



e₂

Gambar. 4.8
Analisis Jalur Pendapatan Asli Daerah Terhadap tingkat Kemandirian
Keuangan
Melalui Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh langsung ke Kemandirian Keuangan Daerah dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,994 sedangkan besar pengaruh tidak langsung yaitu 0,069. Oleh karena nilai ($X_1ZY > pX1$) maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

d) Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Melalui Indeks Pembangunan Manusia

Nilai pengaruh tidak langsung/ *Indirect Effect* (IE) pada variabel Prosedur SMM terhadap Kinerja melalui Budaya Kualitas :

Tabel 4.18. Koefisien Korelasi Variabel Intervening

Model	Koefisien Jalur	t	p	R2	ϵ
Sub structural 1 (X2 ke Z)					
X2 (pZX2)	0.179	2.382	0.021	0.218	0.782
Sub structural 2 (X2,Z ke Y)					
X2 (pYX2)	-0.054	2.172	0.000	0.974	0.026
Z (pYZ)	0.272	3.602	0.000	0.974	0.026

Sumber: Lampiran Output SPSS

Besarnya pengaruh tidak langsung/ *Indirect Effect* (IE) Dana Perimbangan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{Indirect Effect (IE)} &= (pZX_2) (pYZ) \\
 &= 0,179 \times 0,272 = 0.049 \\
 X_2 \rightarrow Z \rightarrow Y &= (pYX_2) + (IE) \\
 &= -0.054 + 0.049 = -0.005
 \end{aligned}$$

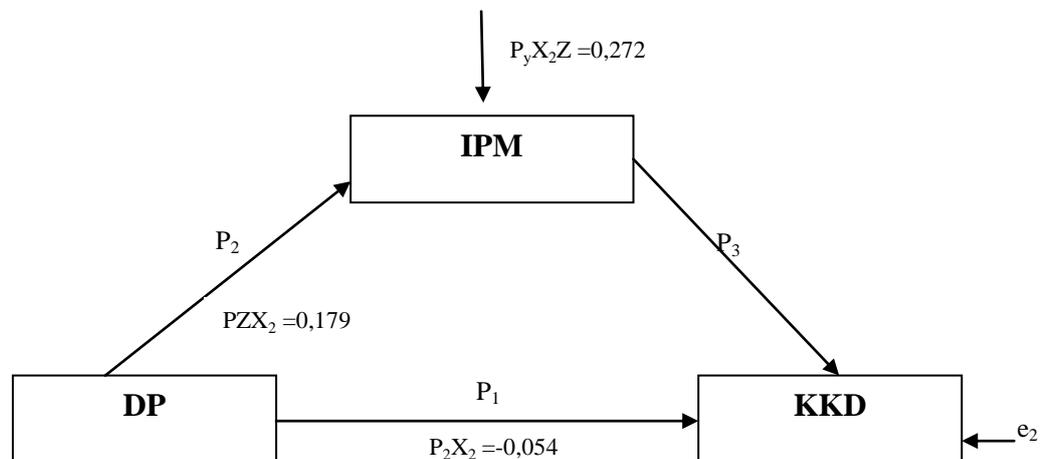
Pengaruh Dana Perimbangan Melalui Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan dijelaskan pada gambar diagram jalur berikut ini :

Tabel 4.19.
Perbandingan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	<i>Direct Effect</i>	<i>Indirect Effect</i>	Total Effect
X ₂	-0,054	0.049	-0,005

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.19. hasil pengujian hipotesis pengaruh Dana Perimbangan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia lebih besar dibanding pengaruh langsung yaitu $-0,0054 > -0,049$ dengan nilai signifikansi 0,000 (Sig. $< 0,05$) maka H_0 ditolak. Artinya Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

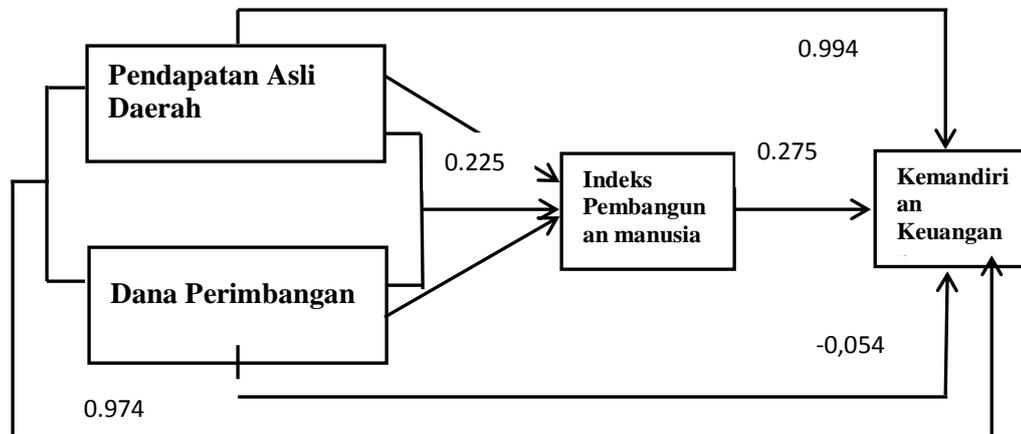


Gambar. 4.9
Analisis Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Melalui Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dapat berpengaruh langsung ke Kemandirian Keuangan akan dan dapat berpengaruh tidak langsung yaitu dari Indeks Pemabangunan Manusia (sebagai variabel intervening) terhadap Kemandirian Keuangan . Besarnya pengaruh langsung

adalah $-0,054$ sedangkan besar pengaruh tidak langsung yaitu $0,049$. Oleh karena nilai $(X_2ZY < PX_1)$ maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

Berdasarkan data hasil analisis yang diperoleh, maka diagram hasil analisis jalur pada model penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 4.10
Kerangka Konseptual *Path Analysis*

Hasil pengujian hipotesis penelitian dirangkum dalam Tabel 4.20.berikut ini:

Tabel 4.20.
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

No	Hipotesis	Koefisien Jalur	Sig.	Kesimpulan
H ₁	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara	0,255	0,001	Diterima
H ₂	Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara	0,179	0,021	Diterima

H ₃	Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara	0,272	0,000	Ditolak
H ₄	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara	0,994	0,000	Diterima
H ₅	Dana Perimbangan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara.	0,053	0,000	Diterima
H ₆	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui. Indeks Pembangunan Manusia Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara	1,063	0,000	Diterima
H ₇	Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara	-0,005	0,000	Diterima

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (Diolah)

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga H₁ diterima. Hal ini berarti bahwa apabila Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya maka Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara juga akan mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut, Dana Perimbangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga H₂ diterima. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatkan Dana Perimbangan para pegawai maka akan

mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Secara langsung Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan, sehingga H_3 ditolak. Hal ini berarti bahwa Indeks Pembangunan Manusia jika dimasukkan di Kab/kota Sumatera Utara saat ini belum memberikan dampak positif secara langsung terhadap Kemandirian Keuangan. Secara langsung Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan, sehingga H_4 diterima. Apabila pimpinan di Kab/Kota di Sumatera Utara mampu meningkatkan kualitas Pendapatan Asli Daerahnya maka Kemandirian Keuangan juga akan meningkat.

Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan, sehingga H_5 diterima. Hal ini berarti bahwa apabila Kab/Kota di Sumatera Utara mampu meningkatkan Dana Perimbangan mereka, maka tingkat Kemandirian Keuangan semakin tinggi.

Selanjutnya secara mediasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia, sehingga H_6 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kualitas Pendapatan Asli Daerahnya yang baik yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia yang baik dari maka hal tersebut akan mampu meningkatkan Kemandirian Keuangan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Dana Perimbangan juga secara mediasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia, sehingga H_7 diterima. Hal ini berarti bahwa jika Kab/Kota mampu meningkatkan Dana Perimbangan mereka dengan mewujudkannya melalui Indeks

Pembangunan yang baik maka akan berdampak pada peningkatan Kemandirian Keuangan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.20 juga memberikan informasi bahwa kedua variabel baik Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia, sehingga terbukti bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel intervening dalam penelitian ini.

B. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia .

Hasil pengujian memberikan bukti empiris Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimana hal tersebut membuktikan hipotesis diterima. Artinya semakin baik Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa pada Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari Tingginya Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan secara efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nindita Maharditya (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan dapat meningkatkan indeks pertumbuhan manusia. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dodi Chandra

(2012). Yang menyatakan bahwa dana perimbangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian memberikan bukti empiris Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dimana hal tersebut membuktikan hipotesis diterima. Artinya semakin tinggi Dana Perimbangan maka akan semakin tinggi pula Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara..

3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian Keuangan dimana hal tersebut membuktikan hipotesis ditolak. Artinya Indeks Pembangunan Manusia belum berperan aktif dalam meningkatkan Kemandirian Keuangan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia belum dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan secara nyata.

4. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian

Keuangan dimana hal tersebut membuktikan hipotesis diterima. Artinya semakin baik Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil analisis tersebut, terlihat jelas bahwa Pendapatan Asli Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan.

5. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian Keuangan dimana hal tersebut membuktikan hipotesis diterima. Artinya semakin baik Dana Perimbangan maka akan semakin meningkat Kemandirian Keuangan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

6. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh langsung ke Kemandirian Keuangan dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) terhadap Kemandirian Keuangan. Besarnya pengaruh langsung adalah 1.063 sedangkan besar pengaruh tidak langsung yaitu 0,069. Oleh karena nilai $(P1 \times P2 > P1)$ maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

7. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dapat berpengaruh langsung ke Kemandirian Keuangan dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) terhadap kemandirian Keuangan. Besarnya pengaruh langsung adalah 0.0498 sedangkan besar pengaruh tidak langsung yaitu -0.005. Oleh karena nilai ($P1 \times P2 > P1$) maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
4. Pendapat Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
5. Dana Perimbangan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
6. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
7. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi anggaran yang proporsional guna untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara, alokasi anggaran ini harus mampu untuk mendorong agar pembangunan antar daerah guna peningkatan pertumbuhan ekonomian daerah bisa cepat dan nantinya tidak akan tertinggal dengan kabupaten/kota yang lainnya.
2. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap melihat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang, pemerintah juga perlu mengkaji ulang sektorsektor unggulan mana saja yang perlu ditingkatkan alokasi dananya sehingga dapata meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara parsial
3. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi kemandirian penrelolaan keuangan dan indeks pertumbuhan manusia, sehingga hasil penelitian bisa memiliki kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Baihaqi, (2010). *Metode Peneiltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

BPS.2014 *Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara 2013-2014*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statitics of Sumatera Utara Province.

_____.2014 *Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara 2014-2015*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statitics of Sumatera Utara Province.

_____.2014 *Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara 2015-2016*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statitics of Sumatera Utara Province.

_____.2014 *Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara 2016-2017*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statitics of Sumatera Utara Province.

Dwi Prastowo dan Rifka Julianti, (2012),” *Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi)*, Edisi Revisi, Yogyakarta : YPK

Darise, Nurlan (2009). *Pengelolaan keuangan daerah. Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*.

Ghozali, Imam, (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*,Edisi 7, Badan Penerbitan Univesitas Diponegoro, Semarang.

Mahmudi, (2010)*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,Jakarta 2004*.

Rusiadi, dkk (2014). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*, Cetakan Ketiga. Medan: USU Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 revisi *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 revisi *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Ulum,Ihyaul,(2009).*Akuntansi Sektor Publik*,UMM Press,Malang.

United Development Program (2009)

Jurnal

- Andika, R. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada Pt Artha Gita Sejahtera Medan. *Jumant*, 9(1), 95-103.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih.2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah* . Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok 24-27 September 2014.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Amalia, F. R., Purbadharmaja, & BP, I. (2014). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keresasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. *E-Jurnal EP Unud*, 3(2303–178), 257–264.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Kholik, K. (2018, October). Effect of Self-Efficacy and Locus of Control on Small and Medium Entertainment Small Scale. In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 214-225)*.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publikdan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. *JUMANT*, 9(1), 115-132.
- Rizky, M. C., & Ardian, N. (2019). Enhance Employee Performance For Increase Work Motivation On Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Journal Homepage: http://ijmr. net. in*, 7(08).
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.

- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Siregar, N. (2018). Analisis Produk Dan Citra Koperasi Terhadap Wirausaha Koperasi Dalam Meningkatkan Industri Rumah Tangga Pada Masyarakat Desa Lubuk Saban Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang. *Jumant*, 9(1), 79-93.
- Setiawan, N. (2018). Peranan Persaingan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Resistensi Terhadap Transformasi Organisasional). *JUMANT*, 6(1), 57-63.
- Swandewi, .A. Amalia. (2014). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*,.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* .
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.

